

IMPLEMENTASI PROGRAM URBAN FARMING DI KELURAHAN BAMBANKEREP KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Inez Dea Elvaretta, AUFARUL MAROM, HERBASUKI NURCAHYANTO

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

Diponegoro Jln. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Urban Farming is one of the community empowerment initiatives in agriculture implemented by the Semarang City Government. The program aims to reduce poverty, improve community skills, and serve as a learning and human resource development tool in the agricultural sector. The Urban Farming program is also a strategy to improve food security amidst limited land and increasing food demand due to rapid population growth. By utilizing small lands such as home yards, this program is expected to make a significant contribution. This study is a descriptive qualitative research that aims to describe the implementation of Urban Farming program in Bambankerep Village, Ngaliyan Sub-district, Semarang City. Based on the research results, the implementation of the Urban Farming program in Bambankerep Village has not been well implemented. The implementation of the Urban Farming program has not yet reached the aspect of compatibility between implementers and users. In terms of achieving results, it has not been achieved optimally and the community cannot feel the results optimally due to several obstacles faced related to human resources, facilities and infrastructure and other problems. Recommendations from the results of this study are the need for the government to pay more attention and embrace the Women Farmers Group (KWT) in an effort to implement Urban Farming, especially by improving communication between KWT members and increasing the awareness and enthusiasm of members of the Women Farmers Group (KWT), the need to fulfill infrastructure needs, and the need to develop SOPs that specifically regulate the implementation of the Urban Farming program.

Keywords: Program Implementation, Urban Farming Program, Food Security

PENDAHULUAN

Dunia saat ini sedang mengalami laju pembangunan yang sangat cepat, terutama dalam sektor infrastruktur dan sarana prasarana. Proses pertumbuhan ini terutama terlihat di area perkotaan di mana hampir semua area terbuka yang hijau, yang

sebelumnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan sebagai penyedia oksigen bagi penduduk, saat ini telah beralih fungsi menjadi bangunan dan infrastruktur perkotaan. Perubahan ini menyebabkan degradasi serius pada kualitas lingkungan,

dan menjadi pemicu utama dari masalah polusi yang semakin serius.

Permasalahan di perkotaan saat ini menjadi semakin kompleks, termasuk semakin terbatasnya lahan untuk perumahan bagi masyarakat. Alih fungsi lahan pertanian yang berada di pinggiran kota menjadi kompleks industri, pemukiman, dan perkantoran juga menjadi salah satu masalah utama yang mengganggu kenyamanan lingkungan. Selain itu, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang ditunjukkan oleh kenaikan biaya hidup menambah beban bagi warga perkotaan dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat di perkotaan, timbul pula masalah lingkungan yang semakin parah. Mulai dari perubahan lahan hingga penurunan kualitas lingkungan karena polusi serta akumulasi sampah menjadi ancaman serius.

Kota Semarang, yang terletak di Pulau Jawa, Indonesia, merupakan satu dari kota metropolitan besar di Indonesia, menempati posisi kelima setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Berdasarkan Most Livable City Index 2017 yang dirilis Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, Semarang dianggap sebagai salah satu kota metropolitan yang memiliki kualitas hunian yang baik, sebanding dengan Denpasar dan Palembang. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang termasuk dalam klasifikasi kota yang mengalami

pertumbuhan yang cepat. Kepadatan populasi di Kota Semarang cukup signifikan, dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 2 juta orang, yang mungkin meningkat pada siang hari karena kehadiran pendatang dan aktivitas mereka.

Peningkatan jumlah penduduk di Kota Semarang berdampak signifikan pada pertumbuhan pemukiman, yang mengakibatkan pengurangan area pertanian. Hal ini disebabkan karena konversi banyak lahan kosong menjadi area hunian dan perkantoran. Menurut data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), total jumlah keseluruhan penduduk Kota Semarang mencapai 1.659.975 orang, dengan tingkat kepadatan populasi mencapai 4.441,05 orang per kilometer persegi (BPS, Kota Semarang, 2022).

Kelurahan Bambankerep, yang terletak di Kota Semarang, mengalami peningkatan penduduk seiring dengan tren pertumbuhan populasi yang juga terjadi di seluruh Kota Semarang, ini terlihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk Kelurahan Bambankerep Tahun 2020 – 2023

| Tahun | Jumlah KK | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Jumlah Kenaikan Penduduk (Jiwa) | Persentase Kenaikan Penduduk |
|-------|-----------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 2020 | 1.974 | 6.211 | 0 | - |
| 2021 | 1.982 | 6.288 | 77 | 1,240% |
| 2022 | 1.989 | 6.288 | 69 | 1,097% |
| 2023 | 1.998 | 6.440 | 83 | 1,306% |

Sumber : Kelurahan Bambankerep 2023

Dapat dilihat pada tabel bahwa adanya peningkatan jumlah individu Kelurahan Bambankerep Kota Semarang dari tahun ke tahun berikutnya. Dapat dilihat bahwa pada 2020 terdapat 6.211 jiwa an meningkat pada tahun 2021 menjadi 6.288 jiwa dengan kenaikan jumlah penduduk sebesar 77 jiwa dengan presentase kenaikan 1,240%. Pada tahun 2022 Kota Semarang juga mengalami peningkatan populasi mencapai 6.288 jiwa dengan kenaikan 69 jiwa dengan presentase kenaikan 1,097%. Dan pada tahun 2023 menjadi 6.440 jiwa dengan kenaikan 83 jiwa atau 1,306% dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan penduduk di Kota Semarang mengakibatkan perubahan fungsi lahan pertanian menjadi area perkantoran, perumahan, pusat bisnis, perdagangan, dan fasilitas publik lainnya, menyebabkan lahan untuk pertanian semakin terbatas. Dampaknya adalah berkurangnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pangan lokal, yang mengharuskan ketergantungan kota terhadap pasokan hasil pertanian dari wilayah di luar Kota Semarang.

Lahan yang berada di Kelurahan Bambankerep Kota Semarang juga mengalami penurunan seiring dengan peningkatan kepadatan penduduk di Kelurahan Bambankerep. Terjadi alih fungsi lahan dari area pertanian menjadi zona perumahan atau perkantoran, sehingga menyebabkan semakin berkurangnya lahan

yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan pertanian. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2 Luas Lahan Kelurahan Bambankerep 2020 – 2023

| Tahun | Luas Tanah Kering (ha) | Luas Bangunan / Perumahan / Emplasement (ha) | Luas Ladang (ha) | Persentase Penurunan Ladang |
|-------|------------------------|--|------------------|-----------------------------|
| 2020 | 324 | 101 | 219 | 0,000% |
| 2021 | 325 | 112 | 207 | -5,797% |
| 2022 | 322 | 121 | 201 | -2,985% |
| 2023 | 318 | 137 | 189 | -6,349% |

Sumber: Kelurahan Bambankerep, 2023

Dapat dilihat pada tabel bahwa adanya penurunan luas lahan kosong di Kelurahan Bambankerep Kota Semarang dari satu tahun ke tahun berikutnya. Pada tahun 2020 terdapat 219 hektar lahan dan menurun pada tahun 2021 menjadi 207 hektar dengan penurunan 5,797% dan pada tahun 2022 semakin menurun menjadi 201 hektar dengan penurunan 2,985%. Dan pada tahun 2023 terdapat penurunan lahan menjadi 189 hektar dengan persentase penurunan 6,349%.

Pemangkasan lahan di Kelurahan Bambankerep ini memiliki dampak yang signifikan terhadap ketersediaan lahan pertanian, terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat. Dengan adanya pemangkasan lahan, luas area pertanian yang tersedia menjadi terbatas, menyebabkan potensi produksi pangan menjadi terganggu. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat pentingnya pemenuhan kebutuhan pangan yang berkualitas bagi kehidupan masyarakat setempat.

Maka dari itu, Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2021 mengenai Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan untuk mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan. Kebijakan ini bertujuan untuk mempromosikan kegiatan ketahanan pangan di seluruh lapisan masyarakat melalui gerakan pembudayaan pertanian perkotaan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 18/Permetan/Hk.140/4/2015 mengenai Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2015.

Dalam meningkatkan standar hidup penduduk perkotaan di suatu wilayah penting untuk memperkuat ketahanan pangan. Hal ini memastikan bahwa setiap keluarga dan kelompok kecil memiliki akses yang memadai terhadap pangan yang cukup. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan tanggung jawab nasional yang kuat, sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2021-2026. Rencana tersebut berlandaskan atas urgensi mengenai pentingnya pengembangan sistem ketahanan pangan berdasarkan keragaman sumber daya pangan, struktur kelembagaan yang sesuai, serta memerhatikan kekayaan budaya lokal. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin

terpenuhinya kecukupan pangan dan gizi, dari segi jumlah, mutu, hingga ekonomis. Serta upaya ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, sesuai dengan peraturan yang diatur Undang-Undang.

Mencermati hal ini, Pemerintah kota Semarang melalui Dinas Pertanian mengembangkan program *Urban Farming* sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Melalui konsep ini, masyarakat perkotaan didorong untuk terlibat dalam kegiatan pertanian dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang terbatas. Tujuan utama dari *Urban Farming* ini tidak hanya menyediakan pangan sehari-hari, namun juga memberikan solusi bagi ketahanan pangan keluarga dan pemanfaatan lahan kosong. Program *Urban Farming* sendiri adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang sudah diimplementasikan di berbagai kota di Indonesia. Konsep ini menekankan pertanian perkotaan yang menggunakan sumber daya alam, tenaga kerja manusia, dan berbagai produk jasa yang tersedia di sekitar daerah urban. Dengan demikian, program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dari sumber daya yang ada di daerah perkotaan, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat perkotaan secara keseluruhan. Melalui *Urban Farming*, diharapkan masyarakat perkotaan dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap pangan berkualitas dan menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Terbatasnya lahan yang tersedia mempermudah dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan konsep *Urban Farming*. Dengan memanfaatkan lahan terbatas seperti bagian atap rumah dan pagar sebagai area bercocok tanam, serta menggunakan sampah sebagai alat dan wadah budidaya, program ini menjadi lebih dapat diimplementasikan. Botol kemasan air minum, kaleng bekas, atau pipa paralon dapat dijadikan wadah untuk budidaya pertanian.

Kelurahan Bambankerep, yang termasuk mendapat bantuan dalam program *Urban Farming*, dipandang oleh Dinas Pertanian sebagai salah satu wilayah dengan jumlah penduduk dengan strata sosial rendah yang cukup dominan. Dengan populasi penduduk miskin mencapai 504 jiwa dari 168 kepala keluarga, kelurahan ini dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui berbagai jenis usaha produktif.

Dalam pelaksanaan *Urban Farming* di Kelurahan Bambankerep ini masih ada beberapa kendala seperti penurunan hasil panen *Urban Farming* pada tahun 2023 yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.3 Hasil Panen *Urban Farming* Kelurahan Bambankerep Tahun 2023

| Bulan | Jenis Tanaman | Jumlah | Satuan |
|-----------|------------------------------------|--------|---------|
| Januari | Cabai (Bibit) | 356 | polybag |
| | Tomat (Bibit) | 333 | polybag |
| | Terong (Bibit) | 241 | polybag |
| | Pakcoy (Bibit) | 101 | polybag |
| | Kangkung (Bibit) | 3 | polybag |
| Februari | Cabai (Bibit) | 79 | polybag |
| | Tomat (Bibit) | 193 | polybag |
| | Terong (Bibit) | 107 | polybag |
| | Pakcoy (Bibit) | 20 | polybag |
| Maret | Cabai (Bibit) | 65 | polybag |
| | Tomat (Bibit) | 16 | polybag |
| | Terong (Bibit) | 54 | polybag |
| | Pakcoy (Bibit) | 5 | polybag |
| | Jahe, Kencur, Kunci, Sereh (Bibit) | 40 | polybag |
| | Cabai (Panen) | 1,85 | kg |
| | Tomat (Panen) | 21,25 | kg |
| April | Terong (Panen) | 5 | kg |
| | Cabai (Panen) | 0,5 | kg |
| | Terong (Panen) | 0,75 | kg |
| Mei | Terong (Bibit) | 11 | polybag |
| | Cabai (Bibit) | 6 | polybag |
| Juni | Cabai (Bibit) | 1 | polybag |
| | Cabai (Panen) | 2,05 | kg |
| Juli | Cabai (Panen) | 0,9 | kg |
| | Sawi (Panen) | 5 | kg |
| Agustus | Tomat (Panen) | 5 | kg |
| September | Tomat (Panen) | 3 | kg |
| Oktober | | 0 | 0 |
| November | | 0 | 0 |
| Desember | | 0 | 0 |

Sumber : KWT Kembangkerep Lohjinawi Kelurahan Bambankerep (Data diolah penulis, 2023)

Dapat dilihat dalam tabel bahwa hasil panen *Urban Farming* di Kelurahan Bambankerep pada tahun 2023 mengalami penurunan yang sangat signifikan, bahkan pada bulan Oktober serta pada bulan November yang sama sekali tidak ada yang dihasilkan.

Pada tabel di bawah ini juga menunjukkan bahwa pada implementasi pelaksanaan program *Urban Farming* di Kelurahan Bambankerep ini masih terkendala dalam kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam berpartisipasi :

Tabel 1.4 Jumlah Peserta Pertemuan Rutin KWT

**Kembangkerep Lohjinawi Tahun
2019 - 2023**

| Tahun / Bulan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Januari | | | 12 | 18 | 8 |
| Febuari | | 13 | | 12 | |
| Maret | | | | 14 | 8 |
| April | | | | 8 | |
| Mei | | | | | 8 |
| Juni | | | | 7 | |
| Juli | | | | 9 | 9 |
| Agustus | | | | 12 | |
| September | | 14 | | 8 | |
| Oktober | 20 | | 16 | | 8 |
| November | 15 | | 23 | 19 | |
| Desember | | 15 | 24 | 10 | |
| Jumlah | 35 | 42 | 75 | 117 | 33 |

Sumber : KWT Kembangkerep Lohjinawi Kelurahan Bambankerep (Data diolah penulis, 2023)

Dapat dilihat dalam tabel bahwa jumlah peserta pertemuan rutin KWT Kembangkerep Lohjinawi semakin menurun tiap tahunnya dapat dilihat pada tabel tahun 2023 jumlah peserta pertemuan KWT Kembangkerep Lohjinawi bahkan tidak mencapai 10 orang dan pertemuan rutin semakin jarang dilakukan tidak rutin tiap bulannya.

Tabel 1.5 Inventaris KWT Kembangkerep Lohjinawi Tahun 2019 - 2023

| Tanggal | Jenis Barang | Jumlah | Sumber Barang |
|------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------|
| 11 Oktober 2019 | Media Tanam Hidroponik | 5 pcs | CSR (PT.PII & Tiga Langkah) |
| | Polybag | 250 pcs | |
| | Planterbag / Wallplanter | 6 pcs | |
| | Ember | 5 pcs | |
| | Rak | 3 buah | |
| | Mist Pot | 250 pcs | |
| | Pupuk Organik | 2 dus | |
| 29 Juni 2022 | AB Mix | | Dinas Pertanian Kota Semarang |
| | Bibit Jambu | 20 batang | |
| | Bibit Jeruk | 5 batang | |
| | Bibit Laos | 10 batang | |
| | Bibit Mangga | 5 batang | |
| | Bibit Rambutan | 20 batang | |
| | Bibit Salam | 20 batang | |
| 03 Juli 2022 | Bibit Sambiliti | 10 batang | Dinas Pertanian Kota Semarang |
| | Bibit Cabai | 30 batang | |
| | Bibit Jahe Merah | 15 batang | |
| | Bibit Jambu | 20 batang | |
| | Bibit Jeruk | 15 batang | |
| | Bibit Mangga | 15 batang | |
| | Bibit Terong | 15 batang | |
| 09 Agustus 2022 | Bibit Tomat | 15 batang | Dinas Pertanian Kota Semarang |
| | Gunting Taman | 1 buah | |
| | Paranet | 1 roll | |
| | Pot Besar | 3 buah | |
| | Pisau Okulasi | 1 unit | |
| 14 November 2022 | Pipa Pot | 4 batang | Dinas Ketahanan Pangan |
| | Gembor | 10 pcs | |
| | Sekop | 10 pcs | |
| | Selang Air | 20 meter | |
| | Keranjang | 10 pcs | |
| | Semetrai | 10 pcs | |
| | Sekop Tanam | 10 pcs | |
| | Garpu Cabut Tanam | 10 pcs | |
| | Plang nama | 2 pcs | |
| | Timbangan Digital | 1 unit | |
| | Rak Tanaman | 10 pcs | |
| | Tanki Air | 1 pcs | |
| | Rumah Bibit | 1 unit | |

Sumber : KWT Kembangkerep Lohjinawi Kelurahan Bambankerep (Data diolah Penulis, 2023)

Berdasarkan tabel yang disajikan, terlihat bahwa sarana dan prasarana bantuan dari pemerintah, baik melalui Dinas Pertanian maupun Dinas Ketahanan Pangan, telah mulai menurun secara signifikan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, bantuan tersebut bahkan tidak diberikan sama sekali. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan komitmen dari pemerintah dalam mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan. Dapat dilihat bahwa Dinas terakhir yang memberi bantuan

kepada adalah pada bulan November 2022. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius, karena tanpa dukungan yang memadai, upaya untuk meningkatkan produksi pertanian dan ketahanan pangan di tingkat lokal menjadi terhambat.

Berdasarkan gambaran latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Program di Kelurahan Bambankerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang” dalam kajian Administrasi Publik. Metode penelitian yang akan diterapkan adalah metode deskriptif kualitatif, yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana pelaksanaan program di Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Implementasi Program *Urban Farming* di Kelurahan Bambankerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang?
2. Apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program *Urban Farming* Di Kelurahan Bambankerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis Implementasi Program *Urban Farming* di Kelurahan Bambankerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang?
2. Menganalisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program *Urban Farming* Di Kelurahan Bambankerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

KERANGKA TEORI

Model Implementasi Kebijakan

Terdapat beberapa model implementasi kebijakan menurut beberapa ahli yaitu pertama, model implementasi kebijakan oleh George C. Edward III dalam Syahrudin (2018), proses implementasi kebijakan adalah proses yang vital karena meskipun kebijakan itu sendiri bagus, jika implementasinya tidak dipersiapkan atau tidak direncanakan dengan baik, tujuan kebijakan tidak akan tercapai. Implementasi kebijakan merupakan proses yang dinamis, di mana berbagai faktor saling berinteraksi dan memengaruhi pelaksanaannya. Faktor-faktor ini perlu dianalisis untuk menilai sejauh mana dampaknya terhadap implementasi kebijakan. (Syahrudin, 2018).

a. Komunikasi

Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan tergantung

pada seberapa baik para pembuat keputusan memahami apa yang harus mereka lakukan, dan hal ini hanya dapat tercapai melalui komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, keputusan kebijakan atau aturan implementasi harus disampaikan dengan jelas kepada para pelaksana yang tepat. Selain itu, kebijakan yang disampaikan haruslah tepat, akurat, dan konsisten. (Syahrudin, 2018:58).

b. Sumber Daya

Kedua, Sumber Daya. Menurut Edward III dalam Syahrudin (2018:60-61), sumber daya menjadi aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan yang efektif. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sumber daya, termasuk Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran, serta Sumber Daya Sarana dan Prasarana.

c. Disposisi atau Sikap Pelaksana

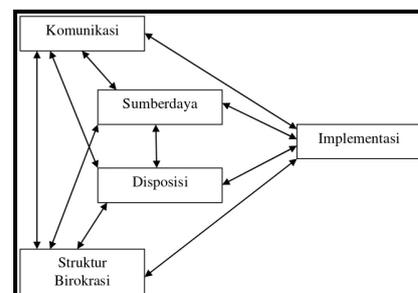
Ketiga, Edward menyatakan bahwa disposisi merupakan kondisi di mana implementasi kebijakan akan berhasil jika pelaksana kebijakan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakannya, tanpa adanya pengaruh dari bias. Sikap para pelaksana merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan; jika mereka setuju dengan kebijakan, mereka akan

melaksanakannya dengan antusiasme, tetapi jika mereka memiliki pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan, proses implementasi akan sulit. (Syahrudin, 2018:62).

d. Struktur Birokrasi

Keempat, Struktur birokrasi menjadi faktor krusial dalam implementasi kebijakan yang rumit karena memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Jika struktur birokrasi tidak sejalan dengan kebijakan yang ada, hal ini bisa menyebabkan pemborosan sumber daya dan menghambat pelaksanaan kebijakan. Sebagai pelaksana kebijakan, birokrasi harus mampu mendukung kebijakan yang telah ditetapkan secara politis dengan melakukan koordinasi yang efektif. (Syahrudin, 2018:63). Menurut Edward, terdapat dua ciri utama dari birokrasi, yakni Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi.

Gambar 1. 1 Model Implementasi George C. Edward III



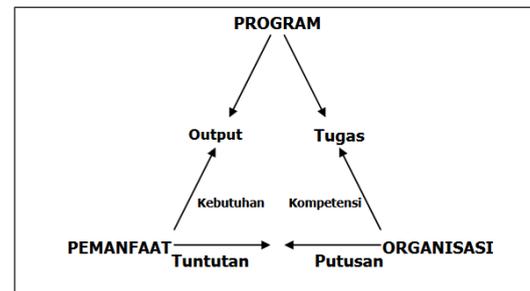
Sumber : George C. Edward III (Syahrudin, 2018:63)

Gambar 1. 2 Model Kesesuaian Implementasi Kebijakan

Model Implementasi Program

Salah satu model implementasi program, seperti yang disampaikan oleh David C. Korten sebagaimana dikutip oleh Bahri et al. (2020), menggambarkan tiga elemen pokok, yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasarannya. Korten menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan program tergantung pada konsistensi ketiga aspek implementasi program tersebut.

- 1) Pertama, kesesuaian antara program dan penerima manfaat, merujuk pada keselarasan antara apa yang ditawarkan oleh program dengan kebutuhan yang dimiliki oleh kelompok sasaran (penerima manfaat).
- 2) Kedua, kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana, yang mengacu pada keselarasan antara tugas yang diamanatkan oleh program dengan kapasitas dan kemampuan organisasi yang menjalankan program.
- 3) Ketiga, kesesuaian antara penerima manfaat dan organisasi pelaksana, mencerminkan keselarasan antara persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi untuk mendapatkan hasil program dengan kemampuan yang dimiliki oleh kelompok sasaran program.



Sumber : David C. Korten dikutip oleh (Bahri et al., 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Urban

Farming di Kelurahan Bambankerep

Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

1. Kesesuaian Program dengan Kelompok Sasaran.

Menurut Korten, faktor penting pertama adalah kesesuaian program dengan kebutuhan kelompok sasarannya. Kesesuaian program dengan kebutuhan langsung kelompok sasaran sangat ditekankan karena hal ini berdampak langsung pada manfaat yang diperoleh oleh kelompok sasaran tersebut. Jika program dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, maka hasilnya kemungkinan besar tidak dapat memberikan manfaat atau memberdayakan masyarakat.

Dalam aspek kesesuaian program dengan permasalahan masyarakat diketahui bahwa Kelurahan

Bambangrejo menghadapi sejumlah permasalahan serius yang terkait dengan kondisi lahan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya lahan kosong yang tersedia, yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan wilayah tersebut. Selain itu, kondisi tanah yang labil menjadi faktor risiko tambahan, memberikan kendala dalam pengembangan kegiatan pertanian. Selanjutnya, dampak kawasan pabrik di sekitar wilayah menciptakan tantangan ekologis dengan menyebabkan sulitnya menanam tanaman langsung di tanah tersebut.

Selanjutnya aspek Kesesuaian program dengan yang dibutuhkan masyarakat ditemukan bahwa pelaksanaan Program *Urban Farming* menjadi solusi yang tepat dalam menanggapi keluhan masyarakat terkait terbatasnya lahan untuk kegiatan pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan. Kendala ini sering kali membuat masyarakat tergantung dengan membeli kebutuhan pangan di pasar dengan harga yang tinggi, mengakibatkan beban ekonomi yang lebih besar. Program *Urban Farming* menjadi respons yang tepat karena tidak hanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan lahan yang terbatas, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan.

Lalu, aspek Adanya tujuan yang dicapai secara jelas dapat diketahui bahwa tujuan *Urban Farming* tersebut memiliki tujuan yang jelas dan sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan, menciptakan lingkungan sehat, meningkatkan peningkatan penghijauan, dan mengelola limbah rumah tangga.

2. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana

Pada aspek Pemahaman Tugas dan Komitmen Pelaksana Program ditemukan bahwa implementor telah memahami dengan baik tugas yang perlu dijalankan dalam pelaksanaan program. Dari pihak Kelurahan, Dinas Pertanian, maupun KWT (Kelompok Wanita Tani) sendiri sudah sangat paham dan melaksanakan tugas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program *Urban Farming*. Namun, komitmen pelaksana dalam pelaksanaan program *Urban Farming* ini dirasa masih rendah terutama komitmen Kelompok Wanita Tani (KWT) itu sendiri. Kelompok Wanita Tani (KWT) masih belum menunjukkan komitmen yang konsisten

dalam melaksanakan program tersebut. Padahal, KWT sendiri memiliki peran yang sangat vital dalam keseluruhan pelaksanaan *Urban Farming* karena mereka berperan secara langsung dalam menjalankan kegiatan tersebut. Kurangnya komitmen dari para pelaksana dalam menjalankan program *Urban Farming* ini menyebabkan pelaksanaan program *Urban Farming* di Kelurahan tidak maksimal.

Selanjutnya, aspek Pelaksanaan Program oleh Pelaksana Bentuk pelaksanaan *Urban Farming* yang telah dilaksanakan oleh Kelurahan Bambangrepep tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2021 Pasal 6 yang menegaskan bahwa gerakan pembudayaan pertanian perkotaan dilaksanakan dengan sosialisasi, pembinaan, pelatihan, dan konsultasi, serta melibatkan Dinas dan Stakeholder terkait dalam pelaksanaannya. Maka dari itu pelaksanaan *Urban Farming* tersebut sudah menunjukkan kesesuaian dengan regulasi yang ada.

Pada aspek Adanya Sarana dan Prasarana yang memadai ditemukan bahwa Dalam perjalanan program *Urban Farming* di kelurahan Bambangrepep, tampaknya terjadi penurunan dalam pemberian bantuan sarana dan prasarana. Meskipun pada

awalnya program ini dijalankan dengan semangat dan antusiasme. Namun, seiring berjalannya waktu, dukungan untuk mempertahankan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung kegiatan pertanian perkotaan menjadi semakin langka. Hal ini menimbulkan dampak yang signifikan bagi para petani *Urban Farming*, yang bergantung pada bantuan tersebut untuk menjaga produktivitas dan kesinambungan usaha pertanian mereka.

3. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana

Yang pertama, aspek Ketepatan target atau sasaran dalam pelaksanaan program. Berdasarkan hasil temuan diketahui bahwa program *Urban Farming* Kelurahan Bambangrepep dilaksanakan dengan target sasaran untuk seluruh masyarakat Kelurahan Bambangrepep dan secara khusus dibentuk KWT (Kelompok Wanita Tani) dalam pelaksanaannya agar pelaksanaannya lebih terstruktur, terarah dan untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintahan, dengan dijalankannya *Urban Farming* ini diharap dapat memotivasi agar setiap rumah dapat melakukan *Urban Farming* ini secara mandiri.

Aspek Pemberdayaan masyarakat sebagai penerima program. Pemberdayaan masyarakat melalui

Urban Farming adalah upaya untuk memberikan ketrampilan dan pengetahuan baru kepada masyarakat dengan menggunakan lahan terbatas secara efisien untuk menghasilkan tanaman hortikultural, khususnya dengan konsep hidroponik. Program Urban Farming memberikan manfaat kepada masyarakat dengan meningkatkan pemahaman tentang pertanian dan memiliki dampak positif pada lingkungan sekitar tempat tinggal. Ketika Urban Farming diterapkan di lingkungan tetangga, hal ini dapat memperkuat solidaritas dan membentuk budaya gotong royong di masyarakat perkotaan. Pemberdayaan masyarakat ini juga sejalan dengan yang disebutkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2021 pada Pasal 3 disebutkan yang pertama bahwa Tujuan dari Gerakan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang adalah untuk memberdayakan masyarakat dengan maksud memperkuat kemandirian pangan dan meningkatkan gizi.

Pada aspek Pemanfaatan hasil program oleh kelompok sasaran ditemukan bahwa seiring berjalannya waktu, *Urban Farming* di Kelurahan Bambankerep mengalami penurunan hasil panen. Hal ini terlihat dari pengamatan bahwa produksi hasil panen saat ini mengalami penurunan

dibandingkan dengan sebelumnya. Kondisi ini memberikan dampak negatif yang signifikan, di mana masyarakat menjadi tidak dapat merasakan manfaat *Urban Farming* secara maksimal

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Urban Farming di Kelurahan Bambankerep Program Urban Farming

Terdapat faktor - faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesuksesan implementasi program *Urban Farming*, yang dapat dikategorikan kedalam 4 golongan menurut teori George C. Edward III keempat golongan tersebut yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana) dan struktur organisasi.

Faktor - Faktor Pendorong

1. Kejelasan Informasi

Informasi disajikan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, serta disampaikan dengan sangat jelas dan rinci, dengan tujuan menghindari adanya kesalahpahaman di antara semua pihak yang terlibat.

2. Konsistensi Informasi

Informasi yang diberikan tetap konsisten tidak berubah - ubah dan tidak menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan program *Urban Farming*.

3. Sumber Daya Anggaran

Dukungan keuangan dari Dinas

Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan, serta kontribusi dari pihak swasta melalui CSR, dirasa cukup dan dapat memenuhi kebutuhan dalam menjalankan kegiatan *Urban Farming* di wilayah Kelurahan Bambangkerep

Faktor - Faktor Penghambat

1. Transmisi Informasi

Terdapat masalah transmisi informasi yang terjadi, terutama transmisi informasi antar anggota Kelompok Wanita Tani (KWT), menjadi hambatan dalam pelaksanaan *Urban Farming*.

2. Sumber Daya Manusia

Kekurangan tenaga kerja menjadi hambatan dalam melaksanakan program *Urban Farming*

3. Sumber Daya Sarana Prasarana

Kurangnya sarana prasarana yang kurang memadai menghambat pelaksanaan program

4. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Sikap pelaksana dari Kelompok Wanita Tani (KWT) masih kurang kesadaran dan kurang konsisten dalam pelaksanaan *Urban Farming*

5. Struktur Birokrasi

Pelaksanaan program *Urban Farming* di Kelurahan Bambangkerep tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut :

Implementasi program *Urban Farming* di Kelurahan Bambangkerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang ditinjau dari aspek kesesuaian, implementasi program *Urban Farming* di Kelurahan Bambangkerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, meliputi :

a) Kesesuaian program dengan kelompok sasaran, pada aspek in program telah sesuai untuk menjawab kebutuhan dari kelompok sasaran. Program *Urban Farming* di Kelurahan Bambangkerep dianggap sesuai dengan kelompok sasarnya karena menjawab kebutuhan masyarakat terkait keterbatasan lahan untuk pertanian guna pemenuhan kebutuhan pangan. Dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan, pelaksanaan program ini sangat relevan mengingat keterbatasan lahan untuk pertanian di Kelurahan Bambangkerep. *Urban Farming* memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Dengan demikian, program ini berhasil memenuhi tujuan utamanya, yaitu memberikan akses terhadap pangan yang mencukupi bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi lahan yang terbatas. Ini menunjukkan

bahwa program *Urban Farming* tidak hanya sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, tetapi juga telah terimplementasi dengan tepat untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat setempat.

- b) Kesesuaian program dengan organisasi pelaksana, dilihat dari Pemahaman Tugas dan Komitmen Pelaksana Program, dapat dilihat bahwa para pelaksana program telah memiliki pemahaman yang cukup dan kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas yang diperlukan oleh program tersebut. Namun, terdapat kendala dalam hal komitmen, khususnya dari pihak Kelompok Wanita Tani (KWT), yang kurang konsisten dalam pelaksanaan program. Kurangnya komitmen dari KWT mengakibatkan pelaksanaan program *Urban Farming* tidak dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, penurunan pemberian sarana prasarana oleh Dinas pelaksanaan program juga menjadi kendala. Dengan adanya penurunan tersebut, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program *Urban Farming* di Kelurahan Bambankerep menjadi terbatas, mengakibatkan hambatan dalam menjalankan kegiatan *Urban Farming* di Kelurahan Bambankerep

- c) Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, dalam hal ini dapat dilihat bahwa kelompok pemanfaat yang ditargetkan dalam program ini adalah masyarakat umum Kelurahan Bambankerep. Dan dilakukan program *Urban Farming* ini juga ditujukan untuk memberdayakan masyarakat di Kelurahan Bambankerep agar dapat mandiri memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Serta telah dibentuk sebuah wadah kelompok yang dinamakan Kelompok Wanita Tani (KWT) yang bertugas melaksanakan program secara langsung dan melakukan pengelolaan terhadap output program. Namun, kurangnya dukungan dari masyarakat umum sebagai penerima manfaat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan program. Serta penurunan hasil dalam kegiatan *Urban Farming*, yang berdampak pada ketidakmampuan masyarakat untuk merasakan manfaat output program secara penuh. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesesuaian antara kelompok penerima manfaat dengan organisasi pelaksana belum tercipta sepenuhnya, karena masih kurangnya dukungan kelompok sasaran terhadap berjalannya program, serta masih kurangnya kemampuan organisasi

pelaksana dalam menghasilkan output program yang menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan.

Pelaksanaan program urban farming juga dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat, mengikuti teori George Edward III. Faktor pendukung meliputi kejelasan informasi, konsistensi informasi, dan sumber daya anggaran. Namun, faktor penghambat termasuk transmisi informasi, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana prasarana, kurangnya komitmen sikap pelaksana dan tidak adanya SOP dalam pelaksanaannya.

SARAN

Berdasarkan penelitian mengenai implementasi program urban farming di Kelurahan Bambankerep yang telah peneliti laksanakan di lapangan masih ditemukan beberapa kekurangan. Maka dari itu, peneliti menyarankan untuk mengoptimalkan implementasi program sebagai berikut :

1. Penting bagi pemerintah untuk rutin melakukan sosialisasi edukasi secara teratur kepada masyarakat tentang manfaat urban farming, cara menjalankannya, dan peran mereka dalam program ini. Jelaskan pentingnya dukungan aktif dari seluruh anggota masyarakat.

2. Perlu adanya monitoring dan evaluasi secara teratur terhadap pelaksanaan program yang melibatkan aktif anggota masyarakat dan Kelompok Wanita Tani dalam proses ini untuk mendapatkan masukan dan umpan balik langsung
3. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kembali kualitas dan ketersediaan sarana serta prasarana demi kelancaran pelaksanaan program *Urban Farming*
4. Diperlukan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program *Urban Farming*. Hal ini penting untuk mengatur langkah-langkah yang harus diikuti secara sistematis dan konsisten dalam setiap tahapan pelaksanaan program.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan rasa hormat dan terima kasih tidak terhingga kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan artikel jurnal penelitian ini kepada:

1. Segenap dosen S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
2. Bapak Drs. Aufarul Marom, M.Si dan Bapak Drs. Herbasuki Nurcahyanto, M.T selaku Dosen pembimbing.
3. Dr. Drs. R. Slamet Santoso, M.Si selaku ketua dosen penguji.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajaroh, I., Murdiyanto, E., & Budiarto, B. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui *Urban Farming* Oleh Kelompok Wanita Tani Srikandi Kapanewon Depok Kabupaten Sleman. *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi*, 23(1), 57-71.
- Rahman, Marianti. (2017). Ilmu Administrasi. Makassar: Sah Media.
- Rohman, Arif. 2009. Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: Laksbang Mediatama
- Subarsono. 2006. Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori, dan Aplikasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Lukmanul, A. (2021). *Urban Farming* metode teknologi dan inovasi baru pada pertanian perkotaan (*Urban Farming* Technology and Methods New Innovations in Urban Agriculture). Available at SSRN 3782290.
- Maulana, R. A., Warsono, H., Astuti, R. S., & Afrizal, T. (2022). *Urban Farming*: Program Pemanfaatan Lingkungan Untuk Pengembangan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang. *Perspektif*, 11(4), 1329-1335.
- Nasihien, R. D., Wulandari, D. A. R., Zacoeb, A., & Setiawan, M. I. (2017). Teknologi Portable Inflated Greenhouse Sebagai Fasilitas Pendukung Peningkatan Ketahanan Pangan Dan Pertanian Perkotaan (*Urban Farming*). *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 9(1), 161-183.
- Rahmilah, J. (2016). *Implementasi Program Urban Farming Di Kota Bandung* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Septiani, K. A. (2021). *KOMPLEKS URBAN FARMING SEBAGAI PUSAT EDUKASI DAN REKREASI DI KOTA SEMARANG* (Doctoral dissertation, Unika Soegijapranata).
- Sihgiyanti, V. J. (2016). Evaluasi implementasi program *Urban Farming* oleh dinas pertanian di Kota Surabaya. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 4(2), 264-272.
- Ulfa, K., Rusdiyana, E., & Saefuloh, W. (2019). Evaluasi Kegiatan *Urban Farming* Progam Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
- Welasari, W., Nanindra Prakosa, A., Nurjulizar, M., Lestari Agustin, P., & Kurniawan, E. (2022). PENGEMBANGAN *URBAN FARMING* DI KOTA DEPOK.
- Wulandari, S., & Tukiman, T. (2023). IMPLEMENTASI PROGRAM *URBAN FARMING* PADA KELOMPOK TANI ELOK MEKAR SARI KOTA SURABAYA. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 7(2), 230–243.
- Zuwita, E. I. (2023). *Analisis Implementasi Kebijakan Program Urban Farming Di Kelompok Rumah Pangan Lestari Kecamatan wonocolo Kota Surabaya* (Doctoral dissertation, UPN Veteran Jawa Timur).

